



Pemkot Susun Program Pengendalian Gratifikasi

YOGYA (KR) - Berdasar hasil pemaparan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaporan gratifikasi di Kota Yogyakarta, dinilai masih rendah. Pada tahun 2011 lalu tercatat ada 3 laporan, sedangkan tahun 2012 hanya 1 laporan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menindaklanjutinya dengan menyusun program pengendalian gratifikasi bagi pejabat.

Menurut Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, rendahnya tingkat pelaporan gratifikasi tersebut belum bisa menjadi tolok ukur keberhasilan menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Namun, bisa jadi lantaran mekanisme pelaporan yang belum dipahami oleh seluruh pejabat. "Kami akan tindak lanjuti dengan program pengendalian gratifikasi supaya semua lebih jelas," terangnya, Sabtu (24/11).

Ketika program pengendalian gratifikasi selesai disusun, maka Pemkot Yogyakarta akan langsung melakukan sosialisasi kepada para pejabat. Haryadi mengaku, program tersebut diharapkan mampu menjadi pilar untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Pihaknya juga belum memutuskan penanggung jawab program tersebut. Hanya saja, baik Inspektorat maupun

kepala dinas memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana. "Jika program itu jalan, maka regulasinya juga jelas. Jadi, siapapun tidak akan bingung bagaimana dan kemana untuk melaporkan dugaan gratifikasi itu," tandasnya.

Selain itu, Haryadi juga membetulkan perhatian pada pejabat pemkot yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Dari 1.184 pejabat pemkot yang wajib melaporkan kekayaannya, baru 66 persen saja yang sudah menunaikan atau 782 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah diumumkan sebanyak 644 orang. Oleh karena itu, program pengendalian gratifikasi nantinya juga bersinergi dengan pelaporan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "LHKPN itu kan basisnya pada koordinasi dan supervisi di bidang APBD dan pelayanan publik. Sehingga perlu membangun kesadaran untuk melaksanakan kewajiban," papar Haryadi.

Terkait dengan penyusunan program tersebut, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta juga akan turut melakukan pengawasan. Terutama desakan kepada Inspektorat agar memaksimalkan tugasnya dalam mengawasi pakta integritas dalam pelayanan publik. - (M-6)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2.			

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005